

ABSTRAK

Naufal Muhamad Shodiqin : Analisis Yuridis Tentang Aakad Bai' Inah : Study Komperatif Fatwa Majelis Penasehat Syariah Malaysia dan DSN-MUI.

Akad Ba'i Inah merupakan salah satu bentuk transaksi dalam fikih muamalah yang kontroversial karena melibatkan dua akad jual beli dalam satu rangkaian yang berpotensi menyerupai riba. Dalam konteks keuangan syariah modern, Ba'i Inah menjadi perdebatan antara lembaga fatwa di berbagai negara, terutama antara Majelis Penasihat Syariah Malaysia dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis dan komparatif terhadap pandangan kedua lembaga tersebut terhadap keabsahan dan implementasi akad Ba'i Inah dalam praktik keuangan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dasar hukum, metode istinbat, serta implikasi fatwa terhadap perkembangan hukum ekonomi syariah dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah. Dengan fokus pada pendekatan hukum dan fikih antara Malaysia dan Indonesia dalam memandang substansi akad Ba'i Inah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan komparatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur terhadap fatwa resmi, kitab fikih klasik dan kontemporer, regulasi hukum positif, serta jurnal akademik. Penelitian ini mengedepankan analisis normatif terhadap muatan substansi fatwa, konteks penerapan, serta relevansinya terhadap prinsip maqāsid al-syari'ah dan asas keadilan dalam transaksi keuangan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi konsep akad dalam fikih muamalah, prinsip keabsahan akad, maqasid al-syari'ah, serta teori harmonisasi fatwa dalam konteks hukum Islam kontemporer. Pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana setiap lembaga fatwa merespons kebutuhan sistem keuangan modern dengan tetap menjaga integritas syariat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) SAC Malaysia membolehkan akad Ba'i Inah dengan sejumlah persyaratan syariah, berlandaskan pada mazhab Syafi'i dan pertimbangan kebutuhan industri keuangan syariah nasional; (2) DSN-MUI tidak merekomendasikan penggunaan Ba'i Inah karena dinilai mengandung unsur hilah yang bertentangan dengan prinsip maqāsid al-syari'ah dan substansi keadilan kontraktual; (3) Perbedaan pendekatan ini mencerminkan tantangan dalam harmonisasi fatwa syariah regional, serta menuntut perlunya dialog antar lembaga fatwa untuk menciptakan keseragaman prinsip dan kejelasan hukum bagi pelaku industri. Untuk meningkatkan kredibilitas sistem keuangan syariah, diperlukan penguatan standar fatwa, peningkatan kapasitas istinbāt hukum, serta kolaborasi antar-otoritas fatwa di tingkat regional dan internasional.

Kata Kunci: *Ba'i Inah*, Fatwa Syariah, SAC Malaysia, DSN-MUI, Fikih Muamalah, *Maqasid al-Syari'ah*, Harmonisasi Hukum.

ABSTRACT

Naufal Muhamad Shodiqin: *Juridical Analysis of the Bai' Inah Contract: A Comparative Study of the Fatwas of the Shariah Advisory Council Malaysia and DSN-MUI.*

The Bai' Inah contract is a controversial form of transaction in Islamic commercial jurisprudence, as it involves two sales contracts in one sequence, which potentially resembles riba (usury). In the context of modern Islamic finance, Bai' Inah has sparked debate among fatwa institutions across countries, particularly between Malaysia's Shariah Advisory Council (SAC) and Indonesia's National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). This study focuses on a juridical and comparative analysis of both institutions' perspectives regarding the validity and implementation of Bai' Inah in Islamic financial practices. This research aims to examine in depth the legal foundations, istinbāt (derivation) methods, and the implications of fatwas on the development of Islamic economic law and public trust in the Islamic financial system, with a particular focus on the legal and jurisprudential approaches in Malaysia and Indonesia toward the substance of the Bai' Inah contract.

The research method employed is descriptive-analytical, using a normative juridical and comparative approach. Data were collected through literature review of official fatwas, classical and contemporary fiqh books, positive legal regulations, and academic journals. This study emphasizes normative analysis of the substance of fatwas, their application contexts, and their relevance to the principles of maqāṣid al-sharī'ah and justice in financial transactions.

theoretical framework of this study includes the concept of contracts in Islamic jurisprudence, principles of contract validity, maqāṣid al-sharī'ah, and the theory of fatwa harmonization in the context of contemporary Islamic law. This approach is essential to understand how each fatwa institution responds to the needs of the modern financial system while maintaining the integrity of Islamic law.

The findings reveal that: (1) SAC Malaysia permits the Bai' Inah contract under specific Shariah conditions, based on the Shafi'i school and the needs of the national Islamic finance industry; (2) DSN-MUI does not recommend the use of Bai' Inah due to its ḥīlah (legal trickery) element, which contradicts maqāṣid al-sharī'ah and the substance of contractual justice; (3) These differing approaches reflect the challenges in regional fatwa harmonization and highlight the need for inter-institutional dialogue to create uniform principles and legal clarity for industry players. Enhancing the credibility of the Islamic financial system requires the strengthening of fatwa standards, improvement of istinbāt capacity, and collaboration among fatwa authorities at regional and international levels.

Keywords: *Bai' Inah, Shariah Fatwa, SAC Malaysia, DSN-MUI, Islamic Commercial Law, Maqasid al-Shariah, Legal Harmonization.*